

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

Miftah Rahmat Nur Sidik
NPP. 31.0455

Asdaf Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: miftahrahmatnursidik@gmail.com

ABSTRACK (in English)

Problem statement/Background (GAP): Purworejo Regency has a high risk index of disasters and a significant number of flood incidents in the last five years. The Purworejo District Disaster Management Agency addresses this issue by empowering communities to mitigate flood disasters. However, the empowerment efforts by the agency have not reached all villages in flood-prone areas. **Purpose:** This research aims to understand how community empowerment in flood disaster mitigation is conducted in Purworejo Regency, Central Java Province, and identify the inhibiting factors. **Method:** This research employs a qualitative descriptive method with an inductive approach to develop the theory of community empowerment according to Mardikanto (2010:73), which consists of six dimensions: empowerment as a process of change, learning, capacity building, social change, community development, and community participation. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The six dimensions of community empowerment in flood disaster mitigation, such as the process of change, learning, capacity building, social change, community development, and community participation, have been implemented through socialization, training, emergency response simulation, and the establishment of disaster management institutions. However, there are still some obstacles to the effectiveness of empowerment, such as the lack of priority given to flood management, budget constraints, and low awareness among the community regarding the dangers of floods. **Conclusion:** The implementation of community empowerment in flood disaster mitigation in Purworejo Regency has been conducted, but it still encounters obstacles that prevent it from being fully optimized.

Keywords: Community Empowerment, Disaster Risk Reduction, Flood Disaster Management

ABSTRAK (in Bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Purworejo memiliki indeks resiko bencana dan jumlah kejadian banjir yang tinggi pada lima tahun terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menyikapi hal tersebut dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir. Upaya pemberdayaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo belum menjangkau seluruh desa yang masuk ke daerah rawan banjir. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dan apa saja yang menjadi faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk mengembangkan teori pemberdayaan masyarakat menurut

Mardikanto (2010:73) yang terdiri atas enam dimensi yaitu pemberdayaan sebagai proses perubahan, pembelajaran, peningkatan kapasitas, perubahan sosial, pembangunan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** keenam dimensi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir sebagai proses perubahan, pembelajaran, peningkatan kapasitas, perubahan sosial, pembangunan masyarakat dan partisipasi masyarakat telah terlaksana dengan sosialisasi, pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana, dan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana namun masih terdapat beberapa hambatan dalam efektivitas pemberdayaan, seperti kurangnya prioritas terhadap penanganan banjir, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya banjir. **Kesimpulan:** Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo telah terlaksana namun masih mendapati hambatan yang menyebabkan belum optimal.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, pengurangan Resiko Bencana, Penanggulangan Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Purworejo masuk dalam kabupaten yang memiliki kelas resiko bencana tinggi. Berdasarkan buku Indek Resiko Bencana Indonesia tahun 2022, skor indeks resiko bencananya 144,57, berada di posisi 5 dari 36 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sedangkan di tingkat nasional berada di posisi 190 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Skor indeks resiko bencana yang tinggi berpengaruh pada variasi bencana di Kabupaten Purworejo lebih dari satu jenis (multi hazard). Menurut Data Informasi Bencana (Dibi) tahun 2022 banjir menempati urutan pertama sebagai bencana yang paling banyak menimbulkan dampak yaitu 18.897 orang menderita. Data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa terdapat 117 desa yang tergolong dalam tingkat risiko tinggi terhadap banjir, sementara 112 desa lainnya diklasifikasikan dalam tingkat risiko sedang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo menyikapi hal tersebut dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam peraturan tersebut, disebutkan perlunya adanya peran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan upaya untuk memberikan keterampilan dan memandirikan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan program kesiapsiagaan masyarakat untuk membantu masyarakat mengolah sumber daya, peluang, dan meningkatkan keahlian dalam menghadapi bencana. Namun, Pemberdayaan yang dilakukan di Kabupaten Purworejo dapat dikatakan belum optimal. Pemberdayaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo belum dapat mencapai seluruh desa yang masuk daerah rawan banjir.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP)

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo masih belum terlaksana dengan optimal. Data yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo

menunjukkan bahwa ada 117 desa yang tergolong dalam tingkat risiko tinggi terhadap banjir, sementara 112 desa lainnya diklasifikasikan dalam tingkat risiko sedang. Pelaksanaan pemberdayaan yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 dapat dilihat dari table berikut.

Tabel 1. 1
Pemberdayaan Masyarakat oleh BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2022

No	Bentuk Peberdayaan	Bencana yang di Tanggulangi	Jumlah Desa
1.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Relawan Desa	Tanah Longsor	31 Desa
		Banjir	13 Desa
		Tsunami	24 Desa
2.	Pelatihan dan Simulasi Bencana	Tanah Longsor	31 Desa
		Banjir	14 Desa
		Gempa Bumi	17 Desa
		Tsunami	23 Desa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo, 2022

Table 1.1 di atas memuat data pemberdayaan yang dilakukan di Kabupaten sampai dengan akhir tahun 2022. Jika dilihat dari total keseluruhan desa di Kabupaten Purworejo yang rawan bencana banjir yang berjumlah 117 desa, baru 16 desa yang telah difasilitasi untuk membentuk Desa Tangguh Bencana, Forum Pengurangan Bencana dan Relawan Desa. Selain itu, simulasi dan pelatihan tanggap bencana banjir baru dilaksanakan pada 14 desa. Jika dihitung dari jumlah keseluruhan desa yang rawan bencana banjir maka program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum menyentuh angka lima persen dari total desa yang masuk zona rawan banjir.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penulis membutuhkan penelitian sebelumnya dalam melakukan penelitian sebagai bahan referensi dan pembandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan Galih Sukmana Putra dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam Di Kabupaten Klaten Community Empowerment In Natural Disaster Mitigation In Klaten District* menemukan pada tahun 2012 Pemerintah Klaten bekerja sama dengan masyara (Mardikanto, 2010)kat yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan untuk melatih dan mendidik masyarakat agar dapat mengantisipasi bencana dengan baik. Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini menggunakan lima pendekatan (5P) dari Suharto yaitu pemberdayaan, penguatan, dukungan, pertahanan, dan pemeliharaan. Hasil menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pendekatan 5P melalui kegiatan pembangunan masyarakat dalam membentuk kesiapsiagaan bencana masyarakat dilakukan di Klaten (Sukmana Putra, 2012).

Penelitian Mochamad Chazienul Ulum dengan judul *Governance Dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir di Indonesia* dalam kesimpulan, manajemen banjir yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan dan partisipasi multi-stakeholder serta partisipasi komunitas secara bersamaan. Pengelolaan banjir harus dilakukan dengan pendekatan sistematis, dan sinergi dari berbagai pihak dalam upaya mengatasi bencana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rasa krisis, komitmen, peran dan tanggung jawab kolektif, serta kelanjutan kerja sama/kolaborasi dalam konteks jaringan pemerintahan dan pembangunan kapasitas untuk menjaga keberlanjutan manajemen banjir yang efektif (Ulum, n.d.).

Penelitian Faiqotul Falah dan Endang Savitri dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Banjir Bandang Di Sumatera Barat* tahun 2016 menemukan bahwa: a) meskipun masyarakat memiliki pengetahuan lokal untuk memprediksi banjir bandang, belum ada sistem yang tersedia untuk mengaktifkan kewaspadaan terhadap banjir bandang; b) belum ada aturan adat yang mengatur penanganan bencana; c) Sosialisasi tentang respons terhadap bencana telah dilakukan di tingkat kecamatan; d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota telah memulai pembentukan Kelompok Sadar Bencana (KSB) di beberapa desa; e) Hingga akhir tahun 2015, pelatihan KSB baru dilaksanakan di Kota Padang, sementara belum dilakukan di kabupaten lain (Falah dan Endang, 2016).

Tri Dewi Wijayanti dan Arwanto Harimas Ginting dalam penelitiannya tahun 2019 dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara* menemukan bahwa pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana menunjukkan kemajuan yang signifikan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti partisipasi aktif masyarakat, kontribusi yang diberikan oleh para pelaksana kegiatan, dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat serta ketidakpastian anggaran yang tidak tersedia setiap tahun (Dewi Wijayanti et al. 2019).

Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan* menemukan Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang dan KSB Kecamatan Padang Selatan. Namun, pemberdayaan yang dilaksanakan belum optimal, hal ini disebabkan oleh tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi dan tugas-tugas yang belum jelas dari KSB Kecamatan Padang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat (Anggun, Putera, and Liesmana 2020).

Joko Pramono dan Joko Suranto melakukan penelitian dengan judul *Partisipasi Masyarakat dalam Manajemen Bencana di Kota Surakarta* penelitian ini menemukan Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam manajemen bencana terlihat pada tahap manajemen bencana itu sendiri. Masyarakat bersama-sama melakukan penyelamatan, evakuasi, dan penyediaan pos darurat atau tempat evakuasi. Masyarakat juga bekerja sama dalam menyediakan semua kebutuhan bagi warga yang terkena dampak. Namun, partisipasi tidak optimal pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, ketiadaan sanksi yang tegas, dan ketiadaan forum bagi masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan bencana (Pramono and Suranto, 2021).

Artikel Pujiati, Syarifah, Ritha F Dalimunthe, Madiasa Ablisar dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Dan Sistem Peringatan Dini Dengan Teknologi Internet Of Things (Iot) Di Perumahan Deflamboyan Desa Tanjung Selamat* menemukan hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana banjir, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya. Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana banjir melalui sistem peringatan dini untuk tingkat siaga dan waspada. Program Pengabdian Masyarakat ini juga berperan dalam membentuk dan memberdayakan komunitas Bidang Siaga Bencana (BSB) di wilayah Perumahan DeFlamboyan, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal (Pujiati, Dalimunthe, and Ablisar 2022).

Nina Herlina, Yayan Hendrayana, Ilham Adhya, Toto Supartono, Zillan Zalila, dan Bima Aria Indra Prahasta dalam penelitian berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan*

Kapasitas Mitigasi Bencana di Desa Cimara Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan berusaha memastikan konsekuensi kerusakan lingkungan, upaya mitigasi bencana, dan tindakan pasca bencana dapat berhasil dengan efektif melalui pendekatan yang lebih mendalam. Hal ini akan membantu untuk memperluas pemahaman dan pola pikir dalam memahami lingkungan (Nina Herlina et al. 2022).

Penelitian Saipullah Hasan, dan Asih Setyaningrum dengan judul *Pemberdayaan Penanganan Banjir Di Desa Dororejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati* menemukan Penanganan banjir melibatkan identifikasi penyebab dan dampaknya, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan relawan. Masyarakat berperan penting dengan terlibat secara aktif dalam upaya penanganan banjir. Sementara itu, relawan dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial kepada masyarakat (Hasan & Setyaningrum, 2023).

Penelitian Salomo Payokwa dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua* menemukan BPBD Kabupaten Jayapura melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana di Distrik Sentani melalui serangkaian kegiatan, termasuk sosialisasi, penyuluhan, latihan simulasi tanggap darurat, dan pembentukan desa/kampung tangguh bencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan di wilayah tersebut. Meskipun menghadapi hambatan seperti minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya infrastruktur pendukung, kerjasama antara BPBD dan pihak terkait lainnya membantu dalam pelaksanaan tugas BPBD di bidang kebencanaan Click or tap here to enter text..

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif dimana penelitian ini mengembangkan teori pemberdayaan yang dikemukakan Mardikanto (2010) yaitu pemberdayaan sebagai proses perubahan, pembelajaran, peningkatan kapasitas, perubahan sosial, pembangunan masyarakat dan pengembangan partisipasi masyarakat dipadukan dengan legislasi yang berlaku dan upaya penanggulangan bencana banjir yang telah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo lakukan.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Simangungsong (2017:19) Penelitian kualitatif dipandang sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel dan dimungkinkan untuk disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat, dan gejala yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yang menguraikan masalah dengan mengumpulkan data data dan fenomena yang telah terjadi dari masa lampau hingga saat ini. Pendekatan ini mampu memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena dengan detail, teliti, dan berdasarkan pada realitas yang nyata. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan induktif. Tujuan digunakannya pendekatan induktif pada penelitian

ini adalah untuk mengembangkan teori Pemberdayaan yang dikemukakan Mardikanto (2010) yaitu pemberdayaan sebagai proses perubahan, pembelajaran, peningkatan kapasitas, perubahan social, pembangunan masyarakat dan pengembangan partisipasi masyarakat yang dipadukan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari wawancara kepada informan yang dipilih dengan purposive, dan observasi ke lapangan. Informan terdiri dari 6 instrumen yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Kapala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Purworejo, Kapala Bidang Informasi dan Sistem Dasar Kebencanaan Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Kabupaten Purworejo, Analis Kebencanaan BPBD Kabupaten Purworejo, Camat dan Masyarakat. Masyarakat yang dipilih adalah masyarakat yang paham dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten purworejo yaitu Kepala Desa, Anggota Organisasi Kebencanaan dan Masyarakat peserta pelatihan tanggap bencana banjir. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Purworejo

Berdasarkan teori pemberdayaan menurut Mardikanto (2010:74) pemberdayaan sebagai proses perubahan, pembelajaran, penguatan kapasitas, perubahan sosial, pembangunan masyarakat, dan pengembangan partisipasi masyarakat, Melalui penelitian lapangan yang menggunakan instrumen yang disusun oleh penulis sendiri dan didukung oleh pedoman wawancara serta dokumen lainnya, temuan dari setiap dimensi pemberdayaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

3.1.1 Pemberdayaan sebagai Proses Perubahan

Upaya penanggulangan bencana, pemberdayaan sebagai proses perubahan berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat berperan dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat sebagai proses perubahan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo berusaha merubah pola pikir, sikap, dan nilai-nilai individu atau kelompok yang berada di daerah yang sering terjadi bencana banjir agar kedepannya dapat memiliki kemampuan dalam mengurangi resiko bencana banjir. Peningkatan taraf hidup melalui pemberdayaan yang dimaksud dalam penanggulangan bencana banjir adalah ketika masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana banjir mampu mengelola potensi yang dimiliki masyarakat yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo. Salah satu aspek utama dari pemberdayaan dalam penanggulangan bencana banjir adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat terkait cara mengelola potensi yang ada.

3.1.2 Pemberdayaan Sebagai Proses Pembelajaran

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses pembelajaran dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Purworejo bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang diberdayakan di wilayah rawan banjir memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana banjir. Upaya pemberdayaan tidak terbatas pada pemberian bantuan atau sumber daya kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan pribadi. Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat menjadi faktor penting dalam pemberdayaan untuk mengurangi resiko terjadinya kerugian akibat bencana banjir. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi,

pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana, dan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana.

3.1.3 Pemberdayaan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas

Kapasitas merujuk pada sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok atau lembaga untuk meningkatkan kesiapan, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana. Upaya pemberdayaan masyarakat harus memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu ataupun kelompok dalam mengurangi risiko banjir.

3.1.4 Pemberdayaan Sebagai Proses Perubahan Sosial

Penanggulangan bencana banjir yang mengedepankan budaya demokrasi dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam upaya penanggulangan bencana. Mengedepankan budaya demokrasi memungkinkan adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi dengan menguatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menjaga transparansi dalam penyediaan informasi terkait bencana dan upaya penanggulangan menjadikan masyarakat dapat lebih percaya dan terlibat secara aktif dalam mendukung upaya tersebut. Adanya akuntabilitas juga memastikan bahwa keputusan yang diambil dan penggunaan sumber daya dalam penanggulangan bencana banjir dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga tercipta tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses perubahan sosial harus dilandasi dengan rasa kebersamaan dan saling peduli satu sama lain sehingga dalam suatu kelompok masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih tanggap dan adaptif terhadap ancaman dan risiko yang muncul dari bencana banjir, serta memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan bencana di masa mendatang.

3.1.5 Pemberdayaan Sebagai Pembangunan Masyarakat

Gerakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan banjir memang seharusnya melibatkan keikutsertaan aktif masyarakatnya. Partisipasi masyarakat sangat penting karena mereka merupakan subjek sekaligus objek yang berkaitan langsung dengan bencana. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan banjir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program penanggulangan bencana banjir. Melibatkan masyarakat mengharuskan adanya penyamaan program penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo sebagai *leading sector* yang menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana, memiliki kewenangan untuk menyelaraskan jalannya berbagai program dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Upaya pencegahan harus tersusun dengan baik mulai dari arah kebijakan dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Banjir tidak dapat dicegah pada saat musim penghujan telah tiba namun perlu upaya untuk menghadapinya jauh-jauh hari agar resiko terjadinya bencana banjir semakin berkurang. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo memiliki peran penting dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat sebagai pendukung program pemberdayaan penanggulangan bencana banjir. Sumber daya lokal dapat berupa budaya gotong royong, potensi relawan yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan saat tanggap darurat bencana.

3.1.6 Pemberdayaan Sebagai Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Totok Mardikanto & Subianto (2015:81) menjelaskan Partisipasi secara umum dapat dipahami sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir merupakan betuk dari kesadaran, kepedulian, dan

tanggung jawab masyarakat terhadap penanggulangan bencana banjir. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan penanggulangan banjir dilakukan dengan harapan agar masyarakat mendapat pengetahuan dan keterampilan untuk selalu siap, siaga, dan mandiri dalam menghadapi bencana banjir. Meskipun bencana banjir tidak dapat dihindari, namun dengan pengetahuan yang cukup, bencana banjir dapat dicegah atau diminimalkan dampak yang ditimbulkan.

3.2 Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Purworejo

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan responsifitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo yaitu kurangnya anggaran penanggulangan bencana banjir, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang belum terfokus pada penanggulangan bencana banjir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana banjir, kelembagaan penanggulangan bencana yang belum optimal.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian pada pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai proses perubahan yang dikemukakan Mardikanto (2010:74) sebagai proses perubahan, pembelajaran, peningkatan kapasitas, perubahan sosial, pembangunan masyarakat dan pengembangan partisipasi masyarakat telah dilaksanakan dengan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tanggap bencana. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga membentuk kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan yaitu Forum Pengurangan Resiko Bencana tingkat Kecamatan dan Desa Tangguh Bencana. Upaya yang dilakukan telah berjalan namun masih terhambat oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya anggaran penanggulangan bencana banjir, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang belum terfokus pada penanggulangan bencana banjir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana banjir, kelembagaan penanggulangan bencana yang belum optimal. Peneliti memberikan Saran pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo meliputi intensifikasi penyuluhan di media sosial untuk efektivitas dan hemat biaya, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, dan peningkatan anggaran dengan alokasi lebih besar dari pemerintah daerah dengan melibatkan dukungan sektor swasta. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dikemukakan Triana Anggun, Roni Ekha Putera, dan Roza Liesmana (Anggun, Putera, and Liesmana 2020) dimana menggunakan teori yang sama dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga menemukan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Saipullah Hasan, dan Asih Setyaningrum (Hasan and Setyaningrum 2023) menemukan Penanganan banjir melibatkan identifikasi penyebab dan dampaknya, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan relawan.

IV. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan, namun masih menghadapi sejumlah hambatan. Meskipun telah ada upaya dalam proses perubahan, pembelajaran, peningkatan kapasitas, perubahan sosial, pembangunan masyarakat, dan partisipasi masyarakat, belum semuanya berjalan secara efektif. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya banjir, fokus pemberdayaan yang belum optimal dalam penanggulangan banjir, dan

kelembagaan penanggulangan bencana yang belum sepenuhnya optimal. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu peningkatan alokasi anggaran, peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko banjir, penekanan pada pemberdayaan yang lebih terfokus pada mitigasi banjir, dan optimalisasi lembaga penanggulangan bencana. Ada kemajuan dalam pemberdayaan masyarakat, langkah-langkah lebih lanjut harus diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan meningkatkan hasil dari upaya-upaya tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada waktu penelitian yang menyebabkan peneliti tidak dapat melakukan observasi ke semua desa di Kabupaten Purworejo yang berada di wilayah rawan banjir.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan belum dapat menjangkau semua *stackholder* yang menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir, sehingga besar harapan agar penelitian ini dapat disempurnakan untuk menemukan hasil yang maksimal pada pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Purworejo.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo dan jajarannya, Camat, Kepala Desa dan seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo yang dilibatkan serta seluruh pihak yang telah mendukung sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggun, Triana, Roni Ekha Putera, and Roza Liesmana. 2020. 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kecamatan Padang Selatan'. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 1 (2): 123–37. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i2.2415>.

Dewi Wijayanti, Tri, Arwanto Harimas Ginting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jawa Barat, and Tri Dewi Wijayanti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2019. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kutai Kartanegara'. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11 (2): 42–57. <https://doi.org/10.33701/jt.v11i2.695>.

Falah dan Endang Savitri Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Surakarta, Faiqotul. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Banjir Bandang Di Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS*. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8529/57_Faiqotul%20Falah.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hasan, Saipullah, and Asih Setyaningrum. 2023. 'Pemberdayaan Penanganan Banjir Di Desa Dororejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati'. *Journal of Community Development and Disaster Management* 5 (2): 49–58. <https://doi.org/10.37680/jcd.v5i2.3531>.

Nina Herlina, Yayan Hendrayana, Ilham Adhya, Toto Supartono, Zillan Zalila, and Bima Aria Indra Prahasta. 2022. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Di Desa Cimara Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan'. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment* 1 (2): 43–48. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.18>.

Payokwa, Salomo, Kabupaten Tolikara, Papua Program, Studi Manajemen Keamanan, and Keselamatan Publik. n.d. 'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

http://eprints.ipdn.ac.id/11355/1/SALOMO%20PAYOKWA_29.1827_PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT%20DALAM%20MITIGASI%20BENCANA%20BANJIR%20MELALUI%20BADAN%20PENANGGULANGAN%20BENCANA%20DAERAH%20DI%20DISTRIK%20SENTANI%20KABUPATEN%20JAYAPURA%20PROVINSI%20PAPUA.pdf

Pramono, Joko, and Joko Suranto. n.d. *'Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kota Surakarta'* 6 (1): 6–7. <https://doi.org/10.26905>.

Pujiati, Oleh, Ritha F Dalimunthe, and Madiasa Ablisar. 2022. *'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Dan Sistem Peringatan Dini Dengan Teknologi Internet Of Things (Iot) Di Perumahan Deflamboyan Desa Tanjung Selamat'*. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri* 1 (4). <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>.

Sukmana Putra, Galih. n.d. *'Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Alam Di Kabupaten Klaten Community Empowerment In Natural Disaster Mitigation In Klaten District'*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/153914/MTUzOTE0>

Ulum, Mochamad Chazienul. n.d. *'Governance Dan Capacity Building Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Indonesia'*. <https://jdpb.bnppb.go.id/index.php/jurnal/article/view/66/66>

